

LAMPIRAN

Lampiran 1

detikNews / Berita / Detail Berita

Follow detikcom



Selasa 03 Mar 2015, 09:07 WIB

Dan Parpol pun Mulai Ragu Lanjutkan Hak Angket untuk Ahok

- detikNews

0

SHARES

f

0

t

0

g+

0

82

82



Jakarta - Imbas dari ribut Gubernur DKI Basuki T Purnama dan DPRD soal dana siluman APBD 2015, anggota DPRD ramai-ramai mengajukan hak angket. 106 Anggota DPRD sepakat secara bulat mengusung hak angket.

Namun, belum juga penyelidikan berjalan, kini sudah ada fraksi yang memilih menarik pengajuan hak angketnya. Adalah fraksi NasDem yang paling pertama mencabut hak angketnya. alasannya, tak perlu mengajukan hak angket dan lebih memilih

menyerahkan masalah APBD DKI pada institusi hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung dan kepolisian. Gondangdia, Jakpus, Senin (2/3/2015) kemarin

Setelah NasDem, satu per satu fraksi di DPRD mulai gamang apakah akan melanjutkan sikap tersebut atau memilih menariknya. Reaksi keras memang lebih banyak disuarakan dari DPP partai yang meminta kadernya menarik hak angketnya.

Sebut saja Hanura, PDIP dan PKB yang pada tataran DPP sudah mulai mengagendakan pertemuan dengan anggota DPRD-nya untuk membahas soal hak angket untuk Ahok ini.

Ketua DPP Hanura Dossy Iskandar mengatakan akan memanggil anggota DPRD DKI dari fraksi Hanura untuk meminta penjelasan mengenai sentral masalah APBD yang membelit Ahok dan anggota dewan Kebon Sirih.

Sedangkan DPP PDIP akan memanggil DPD DKI dan fraksi PDIP DPRD untuk meminta laporan dan klarifikasi. Setelah itu barulah DPP akan menentukan sikap. DPP PKB sendiri juga disebut sudah memutuskan untuk menarik hak angket namun belum diputuskan secara resmi. Keputusan partai akan resmi dikeluarkan setelah rapat internal kader digelar. Namun, disebut Wakil Sekjen PKB Daniel Johan bahwa kemungkinan akan dicabut.

"Soal kemungkinan besar itu ditarik. Tapi, ini belum final," kata Daniel saat dihubungi. Daniel mengatakan alasan instruksi itu diturunkan karena hak angket dinilai melangkahi hak interpelasi yang seharusnya lebih dulu dilakukan. Faktor lainnya karena seharusnya Ahok dan DPRD menjalin hubungan yang harmonis demi kepentingan warga Jakarta.

Berbeda dengan PKB, Hanura dan PDIP yang akan mengadakan rapat internal partai dan mengambil sikap, PPP kubu Djan Faridz justru bersikap netral karena menilai hak angket adalah hak pribadi anggota dewan. Namun, Sekjen Ahmad Dimiyati meminta kadernya di DPRD termasuk Abraham 'Lulung' Lunggana bisa mendukung Ahok hingga masa jabatannya selesai di 2017.

Sayangnya, langkah itu ditolak oleh Lulung yang menilai langkahnya mengajukan hak angket memiliki alasan yang kuat. "Biarin aja, dia ketua umum saya. Saya tetap konsisten kepada saya sebagai anggota dewan, kan saya bisa tolak dengan penjelasan yang sangat objektif dan substansi," kata Lulung di kantornya.

Soal hak angket ini memang menjadi hak masing-masing anggota dewan. Hak angket menjadi salah satu hak anggota dewan menjalankan fungsi pengawasan DPRD untuk menyelidiki suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas tetapi diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Soal adanya campur tangan DPP dalam keputusan kadernya, itu sepenuhnya menjadi aturan internal masing-masing partai.

Lampiran 2

detikNews / Berita / Detail Berita

Follow detikcom



Minggu 08 Mar 2015, 18:15 WIB

Ketua DPD: Hak Angket Bukan Untuk Jatuhkan Gubernur

- detikNews

0
SHARES

f 0

0

g+ 0

31



Jakarta - Anggota DPRD DKI saat ini sedang menggulirkan hak angket untuk menyelidiki persoalan APBD 2015 yang membuat hubungannya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tak harmonis. Ketua DPD Irman Gusman mengingatkan bahwa hak angket tidak boleh untuk menjatuhkan gubernur DKI.



"Kalau hak anget hanya untuk melihat benar atau tidak, silakan tapi bukan untuk jatuhkan gubernur ya. Supaya orang jadi terbuka," kata Irman usai diskusi di Senayan City, Jakpus, Minggu (8/3/2015).

menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang dinilai melanggar undang-undang.

Irman mengapresiasi langkah Ahok yang melaporkan adanya dugaan korupsi dalam APBD DKI 2014. Namun, ia meminta kisruh politik antara Ahok dan DPRD tak berlarut-larut dan merugikan masyarakat.

"Tentu harus tidak perlu merugikan rakyat karena waktunya sudah terlambat, gubernur harus mengeluarkan Pergub untuk tetap bisa lanjutkan APBD 2014, Pergub itu supaya ada payung hukum biar APBD 2014 bisa dilaksanakan, sehingga masalah ini tak ganggu pelayanan masyarakat," pungkasnya.



(bil/imk)

Lampiran 3

detikNews / Berita / Detail Berita

Follow detikcom

Jumat 13 Mar 2015, 07:56 WIB

Hadiri Rapat Revitalisasi Kota Tua Jadi Alasan Tim Angket Panggil Istri Ahok

- detikNews

1
SHARES

f

1

t

0

g+

0

133



Jakarta - Tim angket DPRD DKI yang dibentuk untuk menyelidiki APBD 2015 saat ini sedang memanggil pihak terkait dari Pemprov DKI dan DPRD. Namun tiba-tiba tim ini akan memanggil istri Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Veronica Tan.

Apa maksud pemanggilan tersebut?

"Dalam pertemuan bisa membahas anggaran APBD soal program belanja revitalisasi museum Kota Tua. Itu kan anggarannya ada di Dinas Pariwisata. Kok selevel istri gubernur membahas anggaran. Ada apa?" kata salah satu anggota Tim Angket DPRD, Tubagus Arif saat dihubungi detikcom, Kamis (13/3/2015).

Pemanggilan istri Ahok ini ternyata berkaitan dengan kehadiran Veronica dalam rapat panitia revitalisasi Kota Tua di Balai Kota, Kamis (5/3) lalu. Kehadiran Veronica diketahui dari foto rapat yang beredar luas. Dalam foto itu terlihat Veronica duduk di kursi pimpinan bersama adik Ahok Harry Basuki dan Deputi Gubernur bidang Pariwisata Sylviana Murni. Keberadaan Veronica dibenarkan oleh Sylviana dengan mengatakan bahwa ibu 3 anak itu hanya datang untuk berdiskusi dengan tim revitalisasi Kota Tua.

Menurut Tim Angket, karena berhubungan dengan salah satu program pembangunan kota Jakarta dan menyangkut anggaran maka dia menilai tak ada yang salah dengan pemanggilan tersebut.

"Karena untuk melakukan investigasi dan ini berkaitan dengan anggaran dan kita sedang menyelidiki kejanggalan di APBD 2015 karena itu dia (Veronica) kita panggil. Kita bisa panggil seluruh pihak terkait bahkan seorang ahli loh. Jadi apa yang salah?" sambung politisi PKS ini.

Alasan serupa juga disampaikan anggota tim angket lainnya yakni, Prabowo Soenirman mengatakan pemanggilan Veronica terkait rapat revitalisasi Kota Tua. "Mungkin soal rapat-rapat yang dilakukan dengan SKPD," ucap Prabowo.

Soal pemanggilan ini, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama merasa heran karena merasa tim angket melenceng dari tujuan awal mengusut dana APBD 2015. Menurutnya, DPRD harus membuat tim angket sendiri untuk memanggil istrinya terkait program revitalisasi Kota Tua.

"Panggil alasan apa? Masalah apa? Angket anggaran panggil istri saya dasarnya apa? Iya dong. Harusnya bikin panitia angket khusus memanggil istri Gubernur," kata Ahok kepada wartawan di kantornya, Kamis (12/3).



foto: Veronica Tan (detikcom)

Lampiran 4

detikNews / Berita / Detail Berita

Follow detikcom



Kamis 19 Mar 2015, 06:29 WIB

DPRD Fokus Bahas Evaluasi APBD, Pemeriksaan Angket Ahok Tertunda

- detikNews

0

SHARES

f

0

t

0

g+

0

29

29



Jakarta - Tim Hak Angket DPRD DKI sudah memeriksa sejumlah pihak untuk menyelidiki kisruh anggaran APBD 2015 DKI sejak pekan lalu. Namun kini, jalannya Tim Angket berhenti sementara karena DPRD fokus di pembahasan evaluasi APBD bersama Pemprov DKI.



"Karena sebagian anggota angket terlibat di pembahasan Banggar (Badan Anggaran), jadi tertunda," kata Wakil Ketua Tim Angket Inggard Joshua saat dihubungi, Kamis (19/3/2015).



Tim Angket terakhir kali melakukan pemeriksaan pada Jumat (13/3) pekan lalu. Setelah itu, Inggard menuturkan bahwa belum ada rapat internal lagi di Tim Angket.



29

"Kita belum rapat internal lagi. Mungkin Jumat (20/3)," ujar politikus NasDem ini.

Tim Angket memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan penyelidikan, namun Inggard yakin akan selesai lebih cepat. "Sedang diupayakan. Sekarang baru dua minggu. Kita tidak mau berlama-lama," ucapnya.

Sejak Senin (9/3), Tim Angket telah memeriksa mulai dari Banggar DPRD DKI, konsultan e-budgeting Pemprov DKI, hingga Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD). Setelah itu, pemeriksaan yang awalnya berawal tentang anggaran mulai melebar ke mana-mana.

Tim Angket melempar wacana untuk memanggil istri Ahok, Veronica Tan terkait rapat revitalisasi Kota Tua yang ia hadiri. Setelah memeriksa Deputi Gubernur Sylvianna Murni, Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sarwo Handayani, dan Kepala Dinas Pariwisata Purba Hutapea, Tim Angket kemudian membatalkan pemanggilan untuk Veronica karena merasa sudah cukup mengumpulkan informasi.

Banggar DPRD DKI saat ini memang sedang duduk bersama dengan Pemprov DKI untuk membahas evaluasi APBD yang dikembalikan oleh Kemendagri. Pembahasan itu memiliki tenggat waktu hingga Jumat (20/3).



(imk/fjp)

Lampiran 5

detikNews / Berita / Detail Berita

Follow detikcom



Senin 23 Mar 2015, 14:00 WIB

Tim Angket DPRD: Bisa Jadi Tak Perlu Panggil Ahok

- detikNews

0
SHARES

f 0

0

g+ 0

102



Jakarta - Tim angket DPRD DKI Jakarta terus bekerja usai APBD 2015 hampir pasti gagal terealisasi. Namun tim angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini membuka kemungkinan tidak akan memanggil Ahok untuk meminta keterangan.

"Kita lihat evaluasi kita, kalau dirasa keterangan yang diperoleh sudah memenuhi maka Ahok tak perlu diundang," kata anggota tim angket dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman saat dihubungi, Senin (23/3/2015).

Sebagaimana diketahui, tim angket ini menyelidiki dugaan bahwa APBD 2015 yang diserahkan Ahok ke Kementerian Dalam Negeri adalah bukan hasil pembahasan dengan DPRD, alias palsu.

"Ahok sendiri bisa diundang, bisa tidak diundang. Tidak harus diundang," kata Prabowo.

Ahok tak harus diundang bila keterangan-keterangan yang didapat tim angket telah bisa membuktikan kesalahan-kesalahan Ahok. Hari ini, rencananya Tim Angket segera menggelar rapat internal.

"Karena yang kita lihat adalah kesalahan-kesalahannya saja. Kalau kesalahan-kesalahannya ketemu, apalagi yang perlu diklarifikasi dari Ahok?" tutur Prabowo.

Lampiran 6

detikNews / Berita / Detail Berita

Follow detikcom

Selasa 24 Mar 2015, 17:51 WIB

Tim Angket akan Permasalahakan Ucapan Ahok yang Dinilai Kasar

- detikNews

0
SHARES

f 0

0

g+ 0

40



Jakarta - Ketua Panitia Angket DPRD DKI Muhammad 'Ongen' Sangaji dijadwalkan akan memanggil sejumlah tim ahli mulai Rabu (25/3) esok. Terkini panitia angket rupanya tak sekadar mempersoalkan dokumen RAPBD 2015, tetapi juga etika Ahok.



"Tim angket mencari temuan, ada dugaan pelanggaran undang-undang terkait APBD, kemudian tentang etika dan norma," ujar Ongen di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2015).



Masalah etika yang disorot oleh politisi Hanura itu terkait pilihan kata-kata Ahok yang seringkali bermuatan kasar dan tidak pantas. Ahok juga telah mendapat teguran dari Wapres Jusuf Kalla perihal kata-kata kasar yang kerap digunakannya.

Meski beberapa kali Ahok juga sudah menyatakan permohonan maafnya melalui media, namun hal itu tetap akan dipermasalahkan oleh panitia angket.

"Karena itu ucapan seorang pemimpin yang tidak pantas dicontoh, tentu akan dijadikan salah satu pertimbangan. Ada juga beberapa rekaman televisi lainnya yang kita punya. Berita-berita yang tertulis juga kita simpan," kata Ongen.

Adapun alasan pihaknya mempermasalahkan ucapan kasar Ahok sudah sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan kepanitiaan angket, yakni melakukan investigasi terhadap pelanggaran etika yang dilakukan Ahok sebagai seorang pemimpin. Menurut Ongen apapun alasannya, sebagai orang nomor satu di DKI tidak sepatutnya bicara kasar, termasuk menggunakan 'bahasa toilet' sekalipun.

"(Ucapan kasar) bisa jadi contoh buruk untuk generasi ke depan. Apalagi di Jakarta kan jadi barometer. Pemimpin tentu tidak boleh sampai seperti itu," pungkasnya.



Ketua Tim Angket Ongen Sangaji (Hasan/detikFoto)

(aws/bar)

Lampiran 7

News / Megapolitan

DPRD DKI Kurang Perhitungan Lakukan Hak Angket

Kamis, 5 Maret 2015 | 08:18 WIB



Suasana paripurna pengajuan angket DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/2/2015). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

Terkait

Ahok: Mumpung Lagi HMP, Saya "Panasin" Pak Jokowi biar Saya Jadi Kabulog

Hubungan Pemprov DKI dengan Anggota DPRD Hanya Baik Secara Personal

Bestari Baru Ditanya Warga soal Perseteruan DPRD DKI dengan Ahok

Anggota DPRD DKI Bingung Tak Bisa Ajukan Pokir Saat Reses

145
Share

49
Tweet

43
komentar

0
8+1

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI dinilai kurang melakukan kalkulasi politik ketika memutuskan untuk mengajukan hak angket. Hal ini terbukti dengan adanya perintah dari DPP partai masing-masing fraksi yang menyuruh fraksi menarik dukungan terhadap hak angket.

"Itulah pertanda politisi di DPRD DKI yang tidak melakukan kalkulasi politik terhadap dinamika politik di internal partainya sendiri secara matang ketika mengajukan hak angket," ujar pengamat politik, Emrus Sihombing, ketika dihubungi, Kamis (5/3/2015).

Emrus mengatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa anggota partai di pusat masih bermain-main anggaran dengan anggota partainya yang menjadi anggota legislatif di daerah. Menurut da, sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang melaporkan anggota Dewan ke Komisi Pemberantasan Korupsi telah membuat anggota DPP semua partai merasa takut. Basuki dinilai akan membuka permainan anggaran yang terjadi dalam tubuh legislatif.

Jika ini terbongkar, kata Emrus, terbuka jugalah "permainan" semuanya sehingga, wajar apabila ada partai yang menarik dukungan atas hak angket. Mereka dinilai takut dengan laporan yang dibuat Ahok.

Atas hal ini, Emrus mengatakan, Ahok harus konsisten dalam membongkar anggaran siluman. Ahok juga diminta melaporkan kembali kepada Komisi Pemberantasan Korupsi jika mendapat temuan anggaran siluman yang baru lagi.

"Ini adalah kesempatan bagi Ahok untuk terus maju membongkar mafia anggaran di DPRD," ujar Emrus.

Sebagai informasi, beberapa fraksi memang telah diperintahkan untuk mencabut dukungan hak angket. Satu fraksi yang telah pasti mencabut dukungan ialah Fraksi NasDem. Sementara beberapa fraksi partai lain disebut masih melakukan pembahasan untuk menentukan sikap partai.

Akan tetapi, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik mengatakan, belum ada anggota Dewan yang mencabut dukungannya atas hak angket. Dia menjelaskan, pencabutan dukungan ini bersifat personal. Pencabutan dukungan hanya dapat dilakukan oleh individu anggota Dewan sendiri. Anggota Dewan tetap dikatakan mendukung hak angket jika tidak mencabut sendiri. Meskipun fraksi dan partai sudah memerintahkan untuk menarik dukungan.

Lampiran 8

News / Megapolitan

Hak Angket, Ahok, dan Akrobat Politik DPRD DKI

Rabu, 11 Maret 2015 | 09:08 WIB



Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) didampingi empat wakilnya, masing-masing (dari kiri) Abraham Lunggana, Mohamad Taufik, Triwisaksana, dan Ferrial Sofyan, usai rapat paripurna pengajuan hak angket ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, di Gedung DPRD DKI, Kamis (26/2/2015)

Terkait

Ahok Akui Turut Senang
DKI Dapat Rapor WDP
dari BPK

Pansus DPRD DKI untuk
Periksa Temuan BPK
Belum dapat Instruksi
dari Pimpinan

Dapat Opini WDP,
Transparansi Pemprov
DKI Dipertanyakan

Sanusi Sayangkan Sikap
Ahok, Seharusnya
Keputusan BPK Disikapi
dengan Arif



JAKARTA, KOMPAS.com – Selama sebulan terakhir, jagad politik DKI Jakarta diwarnai dengan wacana pengguliran hak angket bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Tim angket yang beranggotakan 32 anggota DPRD pun telah mulai bekerja untuk menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang dan etika oleh Ahok.

Para legislator Ibu Kota menuding Ahok telah melakukan pelanggaran undang-undang terkait langkahnya menyerahkan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD. Sementara, terkait pelanggaran etika, Ahok dinilai sering mengarahkan opini negatif publik terhadap anggota DPRD.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, tujuan pembentukan panitia hak angket hanyalah akrobat politik para politisi. Tujuannya, apalagi kalau buka demi popularitas. Agus tak yakin DPRD akan menindaklanjuti dengan serius jika memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok. Ingar bingar ini diprediksi akan berakhir antiklimaks.

"Ini hanya sekedar akrobat politik dari para badut-badut. Sekarang satu per satu udah pada *nyabut*, bentar lagi juga bubar," kata Agus, kepada *Kompas.com*, Rabu (11/3/2015).

Selain itu, menurut Agus, Ahok juga mendapatkan keuntungan dalam keramaian ini. Ia menilai, Ahok juga menikmati akrobat politik yang dimainkan para anggota DPRD. Kesempatan ini, kata Agus, dimanfaatkan Ahok untuk menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang tegas dan tak kenal kompromi.

"Ahok juga menikmati euforia ini. Kan dia bisa marah-marah, terutama marahin anggota DPRD," ujar Agus.

Lalu, apa untungnya keriuhan ini bagi masyarakat? Tak ada. Menurut Agus, persoalan ini justru merugikan masyarakat karena mengakibatkan pengesahan RAPBD menjadi APBD terbengkalai.

"Haji Lulung makin terkenal, padahal air di rumah kita enggak jalan," kata dia.

Oleh karena itu, Agus berharap agar Ahok dan DPRD bisa saling mendinginkan hati masing-masing dan duduk bersama menyelesaikan persoalan. "Jadi, sudah lah. Akhiri saja yang kayak begini-begini. Masyarakat *udah males*," ujar Agus,

Untuk mempercepat pengesahan RAPBD, Agus berharap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo turun tangan apabila Ahok dan DPRD DKI tak kunjung menemui kata sepakat.

"Mendagri sahkan aja, terserah mau yang versi mana. Jangan malah jadi *mencla-mencle*," kata Agus.

Lampiran 9

News / Megapolitan

Panggil Istri Ahok, Panitia Angket DPRD DKI Dipertanyakan Logika Hukumnya

Jumat, 13 Maret 2015 | 15:05 WIB



Alsadad Rudi

Rapat hak angket yang digelar di Gedung DPRD DKI, Jumat (13/3/2015). Rapat digelar dalam rangka mendengarkan keterangan Deputy Gubernur DKI bidang Pariwisata Sylviana Murni, terkait kapasitas Veronica Tan dan Harry Basuki dalam sebuah rapat di Balai Kota DKI Jakarta.

Terkait

Syafii Maarif Puji Keberanian Ahok

Ahok: Mumpung Lagi HMP, Saya "Panasin" Pak Jokowi biar Saya Jadi Kabulog

"Kalau Lu Mau 'Jatuhin' Ahok Pakai Cara Instan, Ya Enggak Bisa, Bos"

Sanusi: Kalau Tak Ada HMP, Mau Ditaruh di Mana Muka dan Wibawa DPRD?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, tak habis pikir dengan tindakan tim hak angket DPRD Jakarta terhadap istri Gubernur DKI Jakarta, Veronica Tan. Sebab, menurut dia, pemanggilan tersebut tak berdasar.

"Sulit dapat logika hukumnya. Fokus hak angket itu kan APBD. Kenapa tiba-tiba CSR? Itu tidak ada kaitannya dengan hak angket DPRD DKI Jakarta," kata Margarito kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/3/2015)

Menurut Margarito, tim hak angket tidak memiliki landasan hukum memanggil istri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu, kecuali, kata dia, tim hak angket DPRD Jakarta mempersoalkan pengelolaan perusahaan milik daerah atau BUMD.

"Jadi, kalau fokus penyelidikan tim angket ke pengelolaan uang daerah, bisa. Tapi, tim angket yang sekarang tidak. Tidak ada kaitannya istri Ahok dengan penyusunan APBD. Kalau CSR itu kan realisasi keuangan daerah, ini pembahasan angket DPR baru tahap desain anggaran soal belanja dan biaya, bukan realisasi," ujarnya.

Karena itu, ujar dia, istri Ahok berhak menolak datang. Margarito justru menyarankan Veronica menyiapkan alasan logis secara hukum untuk menolak pemanggilan tim hak angket itu.

"Istri Ahok tolak saja pemanggilan itu. Beri keterangan hukum yang logis. Soalnya tidak ada kaitannya dengan dirinya," kata Margarito. (Edwin Firdaus)

37

Share

8

Tweet

44

komentar

2

8+1

Lampiran 10

News / Megapolitan

DPRD DKI yang Kurang Koordinasi

Selasa, 17 Maret 2015 | 08:24 WIB



Aldo Fenalosa

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menerima wartawan dalam konferensi pers di gedung DPRD, Kamis (5/3/2015) siang setelah terjadinya deadlock mediasi.

Terkait

Syafil Maarif Puji
Keberanian Ahok

Ahok: Mumpung Lagi
HMP, Saya "Panasin" Pak
Jokowi biar Saya Jadi
Kabulog

"Kalau Lu Mau 'Jatuhin'
Ahok Pakai Cara Instan,
Ya Enggak Bisa, Bos"

Sanusri: Kalau Tak Ada
HMP, Mau Ditaruh di
Mana Muka dan Wibawa
DPRD?

JAKARTA, KOMPAS.com – Selama ini, banyak ketidakompakan yang terjadi dalam internal DPRD DKI. Baik dalam hal-hal kecil seperti jadwal rapat hingga upaya pelaporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Seperti kemarin, terkait rapat hak angket yang menjadwalkan memanggil pejabat BUMD. Anggota dewan dari fraksi PKS yang juga panitia angket, Tubagus Arif, memberi informasi bahwa akan dilakukan rapat pemanggilan perusahaan BUMD oleh tim hak angket.

"Sekitar jam 10.00 kita rapat angket agendanya memanggil BUMD," ujar Tubagus ketika dihubungi, Senin (16/3/2015).

Hal tersebut juga disetujui oleh panitia angket lain dari fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman. Akan tetapi, Prabowo mengatakan rapat tersebut akan digelar pukul 14.00 WIB. Pada waktu yang bersamaan, Ketua Tim Hak Angket Muhammad "Ongen" Sangaji justru mengatakan belum ada agenda rapat pemanggilan oleh tim angket, kemarin.

"Belum ada agenda rapat karena panitia mau rapat evaluasi kerja panitia angket selama sepekan bersama panitia angket," ujar Ongen.

Hingga pada akhirnya, Wakil Ketua Tim Hak Angket Inggard Joshua menyatakan rapat pemanggilan BUMD ditunda. Hal ini karena sebagian panitia yang juga anggota badan anggaran harus melaksanakan rapat evaluasi APBD.

Beberapa hal lain yang menunjukkan inkonsistensi anggota Dewan ialah mengenai jadwal pemanggilan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Pemanggilan terhadap Prasetio sudah dijadwalkan beberapa kali. Akan tetapi, sampai saat ini, belum ada kejelasan mengenai pemanggilan Prasetio. Padahal, pemanggilan Prasetio bersinggungan langsung dengan tujuan awal pembentukan tim angket, yaitu untuk menyelidiki keaslian dokumen APBD yang dikirim oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kemendagri.

Akan tetapi, pihak yang justru telah dipanggil terlebih dahulu ialah Deputy Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sylviana Moerni. Pemanggilan Sylviana bertujuan untuk menyelidiki keaslian foto rapat yang diduga dipimpin oleh istri Gubernur, Veronica Tan. Agenda tersebut, dapat dikatakan melenceng dari tujuan awal. Meskipun panitia angket bersikeras menyatakan pemanggilan tersebut masih relevan dengan tujuan awal pembentukan tim hak angket.

19

Share

14

Tweet

15

komentar

0

+1

Lapor tak lapor

Beberapa waktu lalu, anggota DPRD juga sempat mengeluarkan isu dugaan suap yang dilakukan oleh Ahok (sapaan Basuki) kepada Prasetio sebesar Rp 12,7 triliun. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana pernah menggembar-gemborkan bahwa temuan itu akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, Lulung tiba-tiba menyatakan membatalkan niat pelaporan tersebut.

"Soal penyuapan Rp 12,7 triliun, sama aja dengan dengan (anggaran) siluman (yang diributkan Ahok)," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana, Senin (9/3/2015).

Menurut Lulung, dugaan sebesar Rp 12,7 triliun itu masih sebatas upaya. Akan tetapi penyuapan itu belum terjadi. Hal ini sama dengan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang dilaporkan Ahok ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Lulung, anggaran tersebut tidak dapat disebut "siluman". Karena ada pada tahap pembahasan RAPBD dan bukan setelah pengesahan. Atas dasar inilah, kata Lulung, dugaan suap sebesar Rp 12,7 triliun itu pun batal dilaporkan.

Akan tetapi, lagi-lagi hal tersebut dibantah oleh Ketua Tim Hak Angket Muhammad "Ongen" Sangaji. Ongen mengatakan akan tetap melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas dugaan suap sebesar Rp 12,7 triliun.

"Yang bilang tarik dan tidak kan saya bukan Pak Haji Lulung. Yang ketua hak angket kan saya," ujar Ongen di DPRD DKI.

Ongen mengatakan, dugaan suap yang dilakukan Basuki atau Ahok harus tetap dilaporkan. Meskipun baru sekadar upaya penyuapan saja. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada kelanjutan lagi tentang dugaan suap sebesar Rp 12,7 triliun itu. Saat ditanya, Ongen mengatakan, tim angket masih mencoba menyelesaikan semua hal satu per satu.

Lampiran 11

News / Megapolitan

Tak Panggil Ahok dalam Rapat Angket, DPRD Dinilai Tidak Etis

Selasa, 24 Maret 2015 | 16:46 WIB



Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan surat penolakan DPRD menerbitkan Perda APBD 2015, di Balai Kota, Senin (23/3/2015). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

Terkait

Gunakan "E-budgeting", Ahok Masih Temukan "Mark Up" Anggaran di Dinas Pendidikan

Di RKPD 2016, Ahok Akrab dengan Ketua DPRD

Cegah Konsultan Main Curang, DKI Awasi Perencanaan Ulang Rehab GOR

Ahok: Anggaran Dinas Olahraga dan Dinas Pendidikan Paling Banyak yang Aneh-aneh

DEPOK, KOMPAS.com — Tidak dipanggilnya Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dalam proses angket yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dianggap sebagai kejanggalan oleh sebagian pihak. Karena itu, tidak menutup kemungkinan Ahok naik pitam saat menanggapi proses hak angket yang terlihat berat sebelah.

"Saya pikir argumen berat sebelah itu wajar karena (Ahok) seharusnya dipanggil, sejauh hak angket tujuannya untuk menyelidiki," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ikhsan Darmawan, di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (24/3/2015) siang.

Terlepas dari anggapan akan rusuh ketika Ahok dipanggil, DPRD dinilai harus melakukan pemanggilan.

Pemanggilan ini berguna untuk mendapatkan informasi yang berimbang dalam proses penyelidikan terhadap kebijakan Ahok mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun 2015.

"Menyelidiki itu kan penting, apalagi kalau dapat informasi yang banyak karena nanti akan berimbang. Perlu dicatat, itu enggak salah," ujar Ikhsan yang juga dosen ilmu politik di Universitas Indonesia.

Ikhsan tak menampik bahwa proses angket membutuhkan informasi dari ahli atau pakar yang memahami permasalahan tersebut.

Namun, alangkah baiknya, kata Ikhsan, DPRD menyediakan ruang untuk Ahok menjelaskan duduk perkara kebijakan yang diambil olehnya terkait RAPBD DKI 2015.

"Sumber penyelidikan itu kan bisa dari yang tertulis, ahli, atau bisa si yang disangkakan, seperti Ahok. Nah, Ahok itu berhak membela diri, termasuk mengonfirmasi informasi yang didapat DPRD terkait dirinya," kata Ikhsan.

Langkah DPRD ini dianggap tidak etis sehingga terkesan dipaksakan dan memiliki tujuan akhir yang berisiko, pemakzulan.

"Nah, ini yang tidak dilakukan DPRD. Ya kalau bisa dinilai, enggak etis juga ya. Ini terlalu dipaksakan sehingga tujuan dari hak angket terhadap Ahok ini jelas, diberhentikan," kata Ikhsan.

0
Share

0
Tweet

55
komentar

1
g+

Lampiran 12

News / Megapolitan

Hak Angket soal Etika Justru Akan "Menampar" DPRD DKI Jakarta

Selasa, 24 Maret 2015 | 21:01 WIB



Suasana Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015, Senin (12/1).

Terkait

Gunakan "E-budgeting", Ahok Masih Temukan "Mark Up" Anggaran di Dinas Pendidikan

Di RKPD 2016, Ahok Akrab dengan Ketua DPRD

Cegah Konsultan Main Curang, DKI Awasi Perencanaan Ulang Rehab GOR

Ahok: Anggaran Dinas Olahraga dan Dinas Pendidikan Paling Banyak yang Aneh-aneh

JAKARTA, KOMAS.com — Kisruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di DKI Jakarta seharusnya telah usai setelah DPRD DKI menyetujui penerbitan peraturan gubernur dan menggunakan pagu APBD Perubahan tahun lalu untuk APBD 2015, Senin (23/3/2015). Namun, DPRD tetap akan menggunakan hak angket atau hak menyelidiki terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap telah melanggar etika karena berkata kasar dan melakukan fitnah terhadap anggota DPRD.

Pengamat politik, Said Salahuddin, mengingatkan agar DPRD DKI berhati-hati dalam mengubah arah hak angket tersebut. Perubahan hak angket ke ranah etika justru bisa menjadi bumerang bagi anggota DPRD sendiri.

"Kalau masuk etika, ini akan menjadi perdebatan publik, justru akan 'menampar' muka anggota DPRD. Karena bicara soal etika dan tata krama, dalam beberapa hari terakhir muncul kalimat tidak senonoh di Kemendagri oleh anggota DPRD," kata Said, Selasa (24/3/2015).

Selain itu, menurut dia, DPRD tidak bisa dengan mudah mengubah hak angket yang awalnya membahas kebijakan APBD DKI Jakarta menjadi mempersoalkan etika.

"Mekanismenya harus dari awal lagi, tidak bisa diubah begitu saja," kata Said.

Beberapa waktu lalu, pernyataan bernada kasar pernah terungkap saat DPRD DKI Jakarta melakukan mediasi dengan Basuki di Kemendagri beberapa waktu lalu. Saat mediasi berakhir *deadlock*, sejumlah kata seperti "Cina", "bodoh", dan kata-kata kasar lainnya terdengar dari ruang mediasi yang diisi mayoritas oleh anggota DPRD DKI Jakarta.

5.9k
Share

77
Tweet

202
komentar

3
8+1